



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 903 / 807 / BAPPELITBANGDA  
NOMOR : 903 / 295 / DPRD  
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2020  
TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD  
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP  
Jabatan : Bupati Karangasem  
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. a. Nama : I Gede Dana, S.Pd., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem  
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura  
b. Nama : I Nengah Sumardi, SE., M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem  
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura  
c. Nama : I Made Agus Kertiana, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem  
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura  
d. Nama : I Wayan Parka, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem  
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Amlapura, 3 September 2020

BUPATI KARANGASEM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

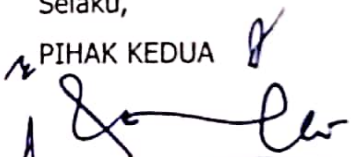
Selaku,

Selaku,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  
I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., MAP

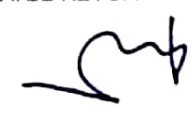
  
I Gede Dana S.Pd., M.Si  
KETUA

I Nengah Sumardi, SE. M.Si

WAKIL KETUA

  
I Made Agus Kertiana, SH

WAKIL KETUA

  
I Wayan Parka, SH

WAKIL KETUA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA-S) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 memuat substansi pokok sebagai berikut :

1. Skala prioritas pembangunan daerah;
2. Prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
5. Sebagai dasar dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA-SKPD;
6. Untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh sesuai plafon yang telah disepakati;
7. Sebagai dasar bagi DPRD untuk menilai Ranperda tentang APBD;
8. Sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **1.3 Dasar Penyusunan**

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan;
2. Kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat;
3. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Efektivitas dan efisiensi anggaran.

Adapun dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
  17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
  18. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Dalam tahun anggaran 2021 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.478.506.367.491,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 258.110.008.273,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
  - a) Pajak Daerah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 124.436.802.630,00.
  - b) Retribusi Daerah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 15.925.536.000,00.
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 11.260.598.088,00.
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 106.487.071.555,00.
  
2. Pendapatan Transfer dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.163.524.259.218,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.052.496.890.000,00, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Dana Perimbangan, dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 970.693.234.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
      - A. Dana Transfer Umum dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 737.126.269.000,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 20.872.896.000,00 dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 716.253.373.000,00
      - B. Dana Transfer Khusus dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 233.566.965.000,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar

Rp. 88.000.583.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 145.566.382.000,00

2) Dana Desa dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 81.803.656.000,00

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 111.027.369.218,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil, dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 74.562.652.018,00

2) Bantuan Keuangan, dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 36.464.717.200,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 56.872.100.000 yang bersumber dari Dana Hibah Pusat untuk pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00

Dari uraian Pendapatan Daerah dan Penerimaan pembiayaan daerah tersebut di atas didapatkan jumlah penerimaan daerah dalam tahun anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp. 1.508.506.367.491,00

Adapun rincian Penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2021**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	JUMLAH DANA
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.478.506.367.491</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>258.110.008.273</b>
4.1.01	Pajak Daerah	124.436.802.630
4.1.02	Retribusi Daerah	15.925.536.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.260.598.088
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	106.487.071.555
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.163.524.259.218</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.052.496.890.000</b>
<b>1)</b>	<b><i>Dana Perimbangan</i></b>	<b><i>970.693.234.000</i></b>
<b>a.</b>	<b>Dana Taransfer Umum :</b>	<b>737.126.269.000</b>
	1) Dana Bagi Hasil	20.872.896.000
	2) Dana Alokasi Umum	716.253.373.000
<b>b.</b>	<b>Dana Taransfer Khusus :</b>	<b>233.566.965.000</b>
	1) DAK Fisik	88.000.583.000
	2) DAK Non Fisik	145.566.382.000
<b>2)</b>	<b><i>Dana Desa</i></b>	<b><i>81.803.656.000</i></b>
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>111.027.369.218</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	74.562.652.018
2)	Bantuan Keuangan	36.464.717.200
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>56.872.100.000</b>
<b>4.3.03</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>56.872.100.000</b>
1)	Hibah	56.872.100.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.478.506.367.491</b>



<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	30.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.000.000.000</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>1.508.506.367.491</b>

### **BAB III**

#### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Berdasarkan kondisi, permasalahan pembangunan dan hasil yang telah dicapai tahun 2019 serta perkiraan capaian tahun 2020, serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial
3. Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup
4. Pembangunan SDM, Adat dan Budaya
5. Insfrastruktur
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Dilihat dari sisi penerimaan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, oleh karena itu besaran belanja daerah disesuaikan, agar terjadi keseimbangan antara penerimaan/pendapatan dengan belanja. Disamping itu penggunaan belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien sehingga tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu dilakukan prioritas belanja yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan, sehingga antara proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Adapun prioritas belanja daerah dalam anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **3.1 Industri, Pariwisata dan Investasi**

Pembangunan Industri, Pariwisata dan infestasi diarahkan untuk :

1. pengembangan industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif serta pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya peningkatan ketahanan ekonomi dan dukungan terhadap sektor pariwisata.
2. pengembangan pariwisata berbasis desa adat dan potensi unggulan daerah dengan mengedepankan kearifan lokal.

3. Pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kemudahan perijinan, serta penyederhanaan regulasi.

Prioritas ini difokuskan pada program-program untuk mencapai sasaran diantaranya : (1) Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin (2) Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga (3) Meningkatkan jumlah investasi., dan (4) Meningkatkan daya tarik wisata yang sedang berkembang.

### **3.2 Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial.**

Pembangunan Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial diarahkan untuk :

1. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pasca pandemi covid 19 melalui gerakan masyarakat hidup sehat, pengendalian penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat, serta diarahkan untuk peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penanganan stunting, serta pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat terutama terhadap masyarakat miskin yang mengalami dampak pandemi covid 19 melalui program-program sistem jaminan sosial, bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Prioritas ini difokuskan pada program-program untuk mencapai sasaran diantaranya : (1) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat, (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (3) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan, (4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia, dan (5) Meningkatnya program perlindungan dan jaminan sosial.

### **3.3 Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup**

Pembangunan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk pencegahan dini dan penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan, ketaatan terhadap regulasi terutama tata ruang wilayah.

Prioritas ini difokuskan pada program-program untuk mencapai sasaran diantaranya : (1) Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, (3)

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam, (4) Meningkatkan pengelolaan persampahan, dan (5) Meningkatkan ketersediaan perencanaan tata ruang.

### **3.4 Pembangunan SDM, Adat dan Budaya.**

Pembangunan SDM, adat dan budaya diarahkan untuk :

1. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, terampil dan inovatif serta berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun informal, peningkatan keterampilan masyarakat, penguasaan IPTEK, pengembangan inovasi dan kreativitas serta penanaman sikap mental dan spiritual.
2. Pemajuan dan pelestarian adat dan budaya melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Prioritas ini difokuskan pada program-program untuk mencapai sasaran diantaranya : (1) Meningkatkan angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun, (2) Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (3) Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan, (4) Meningkatkan partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat, (5) Meningkatkan kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta (6) Meningkatkan kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan.

### **3.5 Infrastruktur**

Pembangunan Infrastruktur Diarahkan untuk membangun insfrastruktur rakyat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat.

Prioritas ini difokuskan pada program-program untuk mencapai sasaran diantaranya : (1) Meningkatkan pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin, (2) Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan, (3) Meningkatkan kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif, (4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan

prasarana utilitas umum, dan (5) Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman.

### **3.6 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.**

Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan diarahkan dalam upaya mewujudkan good governance melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, regulasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.

Prioritas ini difokuskan pada program-program untuk mencapai sasaran diantaranya : (1) Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik, (2) meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah, (3) meningkatkan penegakan disiplin kepada aparatur (4) meningkatkan kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur.

Penyusunan prioritas belanja daerah kabupaten Karangasem memperhatikan sinergitas terhadap Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021. Sinergitas Program Prioritas Kabupaten Karangasem terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dapat digambarkan melalui Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Prioritas Pembangunan Nasional antara lain :

#### **a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, antara lain :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Perizinan Usaha Pertanian
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
  - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
  - c. Program Pengembangan Ekspor
  - d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

**b) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, antara lain :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
  - a. Program Rehabilitasi Sosial
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa
  - a. Program Penataan Desa
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
  - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

**c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualita dan Berdaya Saing, antara lain :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Pengembangan Perumahan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - c. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
  - d. Program Perlindungan Perempuan
  - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - f. Program Pengendalian Penduduk
  - g. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  - h. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

**d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, antara lain :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
  - a. Program Pengembangan Kebudayaan
  - b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
  - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Urusan Pemerintahan Umum
  - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

**e) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, antara lain :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - c. Program Penataan Bangunan Gedung
  - d. Program Penyelenggaraan Jalan
  - e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Program Kawasan Permukiman
  - b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
  - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
  - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

**f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, antara lain :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - a. Program Penanggulangan Bencana
  - b. Program Penanganan Bencana
2. Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan Hidup
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

**g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, antara lain :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Program Pendaftaran Penduduk
  - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal
  - a. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
  - a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Secara lengkap Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tertuang dalam Tabel 3.1 (terlampir).



**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan 6 bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 bidang urusan pemerintahan pilihan, 2 bidang unsur pendukung urusan pemerintahan, 4 bidang unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 bidang unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 bidang unsur kewilayahan dan 1 bidang unsur pemerintahan umum

**Adapun 6 bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp. 534.892.046.212,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp. 323.660.023.455,00 pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan RSUD.

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 83.831.789.292 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. 13.245.695.860,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp. 20.076.546.365,00. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp. 5.968.797.233,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial.

#### **17 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

##### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sebesar Rp. 5.975.614.503,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan.

##### **2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar Rp. 2.638.429.625,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar Rp. 2.835.109.544,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan.

### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 13.438.178.332,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup.

### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp. 7.850.528.896,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 4.656.004.315,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 6.685.520.282,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebesar Rp. 17.288.559.001,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

## **9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 6.230.698.980,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pemerintahan Bidang adalah sebesar Rp. 5.238.896.813,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 5.306.241.293,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp. 3.052.191.464,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

## **13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp. 45.015.600,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Persandian sebesar Rp. 19.994.400,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp. 6.029.486.371,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan.

## **16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebesar Rp. 3.819.840.696,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## **17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah sebesar Rp. 112.774.000,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## **6 bidang urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 5.336.514.243,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perikanan.

### **2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata adalah sebesar Rp. 10.633.388.600,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pariwisata.

### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian adalah sebesar Rp. 18.067.825.294,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pertanian.

#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan adalah sebesar Rp. 4.511.333.700,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian sebesar Rp. 11.392.099.060,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi adalah sebesar Rp. 9.992.550,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan.

### **2 bidang Unsur Pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

#### **1. Sekretariat Daerah**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 38.527.58.359,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.

#### **2. Sekretariat DPRD**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD sebesar Rp. 56.747.954.695,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Karangasem.

#### **4 bidang Unsur Penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

##### **1. Perencanaan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Perencanaan sebesar Rp. 6.934.772.380,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

##### **2. Keuangan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Keuangan adalah sebesar Rp. 223.424.059.305,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BPKAD selaku PPKD.

##### **3. Kepegawaian**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Kepegawaian adalah sebesar Rp. 6.570.776.831,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

##### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar Rp. 634.426.700,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### **Bidang Unsur Pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

##### **1. Inspektorat Daerah**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Inspektorat daerah sebesar Rp. 7.216.041.207,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.

**Bidang Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

**1. Kecamatan**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Kecamatan sebesar Rp. 35.050.458.317,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah seluruh Kecamatan di Kabupaten Karangasem.

**Dan bidang Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah :**

**1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 6.551.152.719,00 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Flapon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara lengkap tertuang dalam tabel 4.1 (terlampir).

**4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.**

**1. Belanja Pegawai**

Plapon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 762.057.169.148,00. Belanja pegawai sebagian besar diarahkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah.

**2. Belanja Barang dan Jasa**

Plapon Anggaran Sementara untuk Belanja Barang dan Jasa dalam tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 398.243.365.719,00. Belanja barang dan jasa diarahkan untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan



pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

### **3. Belanja Hibah**

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja hibah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 6.130.993.248,00. Belanja Hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga terutama untuk organisasi kelembagaan seperti keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### **4. Belanja Bantuan Sosial**

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 758.400.000,00. Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok/masyarakat untuk menangani masalah sosial.

### **5. Belanja Modal**

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Modal tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 134.712.052.454,00. Belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **6. Belanja Tidak Terduga**

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana social serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 7. Belanja Bagi Hasil

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Bagi Hasil tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 18.247.104.022,00. Belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.

## 8. Belanja Bantuan Keuangan

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 179.757.282.900,00. Belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa dalam rangka mendanai sarana prasarana yang menjadi kewenangan desa yang meliputi bantuan keuangan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, gaji perbekel dan perangkat desa.

**Tabel 4.2**

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan  
Tahun Anggaran 2021

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)</b>
1	2	3
1	Belanja Pegawai	762.057.169.148
2	Belanja Barang dan Jasa	398.243.365.719
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	6.130.933.248
5	Belanja Bantuan Sosial	758.400.000
7	Belanja Modal	134.712.052.454
	a. Belanja Modal tanah	-

	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.555.879.242
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.760.188.652
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	60.956.280.000
	e. Belanja Modal Aset tetap lainnya	9.439.704.560
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
8	Belanja Tidak terduga	4.600.000.000
7	Belanja Bagi Hasil	18.247.104.022
8	Belanja Bantuan Keuangan	179.757.282.900

**BAB V**  
**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Rencana penerimaan pembiayaan dihitung berdasarkan besarnya SiLPA tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp. 30.000.000.000,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 5.1. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan belanja daerah, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk Penyertaan modal pemerintah sebesar Rp. 4.000.000.000,00. Total Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,00. Sehingga jumlah pembiayaan netto dalam RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 26.000.000.000,00.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	30.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.000.000.000,00</b>

<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>26.000.000.000,00</b>

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 yang disusun melalui berbagai pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan politis, yaitu PPAS ditetapkan dengan Nota Kesepakatan setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan DPRD Kabupaten Karangasem;
- b. Pendekatan partisipatif, yaitu disamping dibahas oleh wakil-wakil rakyat, PPAS merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Karangsem. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam forum SKPD dan Musrenbang;
- c. Pendekatan tenokratis, yaitu RKPD disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Karangasem.

Selanjutnya dokumen PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Dinas Ketahanan Pangan	
			Persentase terpenuhinya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota		
				Dinas Perikanan	
			Persentase penyelenggaraan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase pelaksanaan perizinan usaha pertanian		
				Dinas Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Meningkatnya promosi dan misi Dagang bagi Produk Unggulan Daerah/Kabupaten		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase meningkatnya promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan daerah/kabupaten		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b>				
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase rehabilitasi sosial terhadap jumlah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Persentase terlaksananya penataan desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Prosentase Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
				Inspektorat	
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terlaksananya pelayanan penunjang pemerintah daerah		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase pengelolaan pendidikan		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terselenggaranya pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara (RSUD.)		
				Dinas Kesehatan	
			Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel		
				Dinas Kesehatan	
			---		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			



### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat		
				Dinas Kesehatan	
			Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
			---		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Prekuensi penyelenggaraan program pengembangan perumahan		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terselenggaranya Program Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi		
				Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase perangkat daerah yang responsif gender		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase desa/kelurahan layak anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			terpenuhinya penunjang urusan pemerintah pada DPPKB		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			terpenuhinya program pengendalian penduduk pada DPPKB		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Terpenuhinya program pembinaan Keluarga Berencana (KB)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Terpenuhi program pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS)		
				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase tersusunnya perencanaan dan pengembangan industri		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Nasional		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Prosentase Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
				Inspektorat	
<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perkantoran		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase pelaksanaan penginventarisiran asset-asset pusaka		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terlaksananya pelayanan penunjang pemerintah daerah		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran urusan penunjang pemerintah daerah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik, bangunan sungai yang tertata, tersedianya dan terpeliharanya prasarana air baku, tersedianya rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, tersedianya dan terpeliharanya bangunan pengaman pantai		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase terlaksananya penataan bangunan gedung di kabupaten Karangasem		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Terselenggaranya jalan kabupaten berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, serta kebersamaan dan kemitraan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase berkembangnya jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Karangasem		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Frekuensi penyelenggaraan program kawasan permukiman		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Prekuensi penyelenggaraan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase kasus kebakaran yang ditangani		
				Dinas Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Kinerja lalu Lintas kabupaten/kota		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>				

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase pasilitasi bantuan sosial pasca konflik		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten yang terselesaikan		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Prosentase pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Prosentase pembinaan dan pengawasan terhadap unit usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		
				Dinas Lingkungan Hidup	
<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase program urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Terwujudnya program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase terselenggaranya informasi administrasi kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase laporan kinerja yang tepat waktu		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase realisasi investasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase pelayanan berbasis sistem informasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintah		
				Sekretariat Daerah	
			---		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			persentase penguatan regulasi dan pemerintah umum		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah		
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Pencapaian target penerimaan pajak daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Prosentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Karangasem	
			Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		
				Kecamatan Abang	
			Presentase terpenuhinya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupate/kota		
				Kecamatan Kubu	
			Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkotaan		
				Kecamatan Selat	



### Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran		
				Kecamatan Rendang	
			Persentasenya terpenuhinya pelayanan administrasi		
				Kecamatan Sidemen	
			Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Kecamatan Manggis	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang tepat waktu		
				Kecamatan Manggis	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali		
				Kecamatan Manggis	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel 3.2

## Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH DANA
1	<b>Bidang Pangan, Sandang dan Papan</b>				
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	117.310.325
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	42.024.800
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	41.025.000
		Program Pengembangan Perumahan	Prekuensi penyelenggaraan program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.974.930
		Program Kawasan Permukiman	Frekuensi penyelenggaraan program kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.394.609.220
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	112.794.403
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	1.491.537.450
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	Dinas Pertanian	378.095.700
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Pertanian	181.493.825
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	ersentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian	626.941.650
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Pertanian	183.000.550
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian	1.032.192.700
	<b>JUMLAH</b>				<b>13.799.000.553</b>
2	<b>Kesehatan dan Pendidikan</b>				
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	87.666.844.820
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	117.618.388.450
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Dinas Kesehatan	120.700.000

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH DANA
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	189.403.000
		Program Peningkatan Pelayanan Blud	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	RSUD	70.000.000.000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	RSUD	7.070.686.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>282.666.022.270</b>
<b>3</b>	<b>Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan</b>				
		Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah kelembagaan masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM dan masyarakat yang mendapat bantuan sosial	Dinas Sosial	622.843.650
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase rehabilitasi sosial terhadap jumlah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Dinas Sosial	1.073.056.850
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah bantuan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	238.390.800
		Program Penanganan Bencana	Persentase pasilitasi bantuan sosial pasca konflik	Dinas Sosial	111.934.700
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan	315.000.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Dinas Ketenagakerjaan	60.007.450
		Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	Dinas Ketenagakerjaan	64.971.725
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Disperindag	4.315.006.300
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase tersusunnya perencanaan dan pengembangan industri	Disperindag	6.088.114.825
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbang Pol Linmas	344.152.300

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH DANA
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	Badan Kesbang Pol Linmas	647.377.300
	<b>JUMLAH</b>				<b>13.880.855.900</b>
<b>4</b>	<b>Adat, Agama, Tradisi, Seni dan budaya</b>				
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	persentase penguatan regulasi dan pemerintah umum	Bagian Kesra	2.215.431.500
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan	Dinas Kebudayaan	2.296.800.000
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan	Dinas Kebudayaan	94.400.000
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem	Dinas Kebudayaan	66.800.000
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelaksanaan penginventarisiran asset- asset pusaka	Dinas Kebudayaan	79.400.000
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pembinaan perpustakaan	Dispustaka	549.891.675
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	Dispustaka	73.916.325
	<b>JUMLAH</b>				<b>5.376.639.500</b>
<b>5</b>	<b>Pariwisata</b>				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Pariwisata	3.209.765.800
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	6.467.811.850
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan pemasaran pariwisata di Kabupaten Karangasem	Dinas Pariwisata	320.802.525
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata	562.916.775
	<b>JUMLAH</b>				<b>10.561.296.950</b>
<b>6</b>	<b>Penguatan Insfrastruktur</b>				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH DANA
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik, bangunan sungai yang tertata, tersedianya dan terpeliharanya prasarana air baku, tersedianya rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, tersedianya dan terpeliharanya bangunan pengaman pantai	Dinas PUPR	14.818.499.748
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah	Dinas PUPR	3.352.150.280
		Program Penyelenggaraan Jalan	Terselenggaranya jalan kabupaten berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan	Dinas PUPR	52.196.258.172
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja lalu Lintas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	7.698.577.650
		Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan informasi Publik	Diskominfo	339.851.550
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan sampah yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	7.970.176.009
	<b>JUMLAH</b>				<b>78.405.337.400</b>
<b>7</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>				
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Disduk Capil	2.116.494.375
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Disduk Capil	1.273.676.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan ijin tepat waktu	DPMPPTSP	450.137.750
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	1.264.102.900
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	526.508.250
		Program Kepegawaian Daerah	Prosentase terselenggaranya program kepegawaian daerah	BKPSDM	779.983.800

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH DANA
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	278.057.600
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Prosentase Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah	356.630.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pbluk yang tepat waktu	Kecamatan Karangasem	50.200.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Abang	109.400.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Kubu	79.000.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Bebandem	48.000.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Selat	64.400.450
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Rendang	88.000.000
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Sidemen	39.985.175
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu	Kecamatan Manggis	71.900.000
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Badan Kesbang Pol Linmas	958.000.523
	<b>JUMLAH</b>				<b>8.554.476.823</b>

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1. INDUSTRI, PARIWISATA DAN INVESTASI</b>						
		13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
					Dinas Ketahanan Pangan	159.174.200	
				Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	752.775.106	
				Persentase laporan kinerja yang tepat waktu			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.948.098.387	
				Persentase pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	797.367.800	
				Persentase terpenuhinya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota			
					Dinas Perikanan	243.895.776	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah			
					Sekretariat Daerah	208.766.000	
		24. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).					
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			
					Dinas Pertanian	626.941.650	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			
					Dinas Pertanian	183.000.550	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
				Persentase pelaksanaan perizinan usaha pertanian			
					Dinas Pertanian	88.374.850	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian	1.032.192.700	
		25. Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Persentase pemenuhan sarana pertanian				
					Dinas Pertanian	378.095.700	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
					Dinas Pertanian	181.493.825	
		27. Meningkatnya angka kecukupan pangan					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Terwujudnya peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				
					Dinas Ketahanan Pangan	117.310.325	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
			Terwujudnya pengawasan keamanan pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan	41.025.000	
		28. Meningkatnya produksi perikanan					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Perikanan	66.399.953	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Perikanan	208.799.450	
		29. Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
			Persentase realisasi investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	187.245.350	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
			Persentase pelayanan berbasis istem informasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.118.600	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
			Persentase Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.798.875	



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.284.225		
		30. Meningkatnya jumlah investasi.						
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Persentase tersebarnya peluang investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66.327.900		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase layanan ijin tepat waktu				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	450.137.750		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase LKPM yang dievaluasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.170.400		
		31. Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga						
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase tersusunnya perencanaan dan pengembangan industri				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.076.399.450		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Nasional				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.399.925		
		32. Meningkatnya perdagangan dalam negeri.						
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83.223.725		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase Meningkatnya promosi dan misi Dagang bagi Produk Unggulan Daerah/Kabupaten				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.199.700		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.550.400	
		40. Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata			
					Dinas Pariwisata	268.259.850	
		41. Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri					
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase pengembangan pemasaran pariwisata di Kabupaten Karangasem			
					Dinas Pariwisata	38.863.900	
		67. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi					
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan			
					Dinas Sosial	122.800.000	
<b>2</b>	<b>2. KESEHATAN DAN JARING PENGAMAN SOSIAL</b>						
		10. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terselenggaranya pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara (RSUD.)			
					Dinas Kesehatan	70.000.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Persentase terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat			
					Dinas Kesehatan	7.070.686.000	
				Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	4.097.903.400	
		11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.					
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya			
					Dinas Kesehatan	10.000.000	
		13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan tertib manajemen dan akuntabel			
					Dinas Kesehatan	29.622.401.484	
				terpenuhinya penunjang urusan pemerintah pada DPPKB			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	10.000.000	
		1. Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 tahun					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase pengelolaan pendidikan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	24.646.478.825	
		58. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia					
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase rehabilitasi sosial terhadap jumlah PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)			
					Dinas Sosial	134.656.850	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Jumlah bantuan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial			
					Dinas Sosial	238.390.800	
		7. Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	52.000.000	
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				---			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.078.308.750	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				---			
					Dinas Kesehatan	158.631.613.434	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				---			
					Dinas Kesehatan	110.700.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				---			
					Dinas Kesehatan	189.403.000	

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				---				
					Dinas Kesehatan	215.199.900		
<b>3</b>	<b>3. KETAHANAN BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							
		13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah				
					Dinas Pemadam Kebakaran	304.299.270		
				Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten yang terselesaikan				
					Dinas Lingkungan Hidup	59.124.475		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah				
					Sekretariat Daerah	40.000.000		
		45. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam						
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	125.674.900		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Prosentase pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	219.806.150		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan				
					Dinas Lingkungan Hidup	20.339.000		
		46. Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C						
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase peningkatan unit usaha dan/atau kegiatan yang berkomitmen dalam pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3				
					Dinas Lingkungan Hidup	24.955.800		
		69. Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal						
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					

### Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.896.799.925	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase kasus kebakaran yang ditangani			
					Dinas Pemadam Kebakaran	137.778.650	
		---					
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				---			
					Dinas Pemadam Kebakaran	1.102.582.450	
<b>4</b>	<b>4. PEMBANGUNAN SDM, ADAT DAN BUDAYA</b>						
		13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase program pemerintahan daerah yang dilaksanakan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.740.305.312	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				persentase penguatan regulasi dan pemerintah umum			
					Sekretariat Daerah	2.215.431.500	
		1. Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 tahun					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase pengelolaan pendidikan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	43.849.797.025	
		21. Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin					
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Frekuensi penyelenggaraan program kawasan permukiman			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	183.400.000	
		23. Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.					
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi			
					Dinas Ketenagakerjaan	315.000.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan			
					Dinas Ketenagakerjaan	60.007.450	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial			
					Dinas Ketenagakerjaan	64.971.725	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Jumlah masyarakat calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan			
					Dinas Ketenagakerjaan	9.992.550	
		32. Meningkatnya perdagangan dalam negeri.					
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.324.757.600	
		4. Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Terlaksananya pengembangan kurikulum pada semua jenjang sekolah			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	40.198.500	
		57. Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Persentase pembinaan perpustakaan			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	512.591.850	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase perangkat daerah yang tata kelola kearsipannya baik			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35.050.000	
		58. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Jumlah kelembagaan masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM dan masyarakat yang mendapat bantuan sosial			
					Dinas Sosial	569.226.750	
		59. Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase perangkat daerah yang responsif gender			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71.599.475	
		60. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak					
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.539.800	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase desa/kelurahan layak anak			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52.499.725	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase anak korban tindak kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu			
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.860.200	
		61. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.010.327.865	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.579.030.075	
		62. Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Jumlah gelar seni budaya yang di laksanakan			
					Dinas Kebudayaan	94.400.000	
		63. Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat					
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase pelaksanaan penginventarisiran asset-asset pusaka			
					Dinas Kebudayaan	79.400.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karangasem			
					Dinas Kebudayaan	66.800.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase penataan arsip dan tersedianya layanan informasi arsip yang smart			
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.374.450	
		64. Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase pelaksanaan pengembangan kebudayaan			
					Dinas Kebudayaan	2.296.800.000	
		67. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi					
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase Terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	404.417.300	
		69. Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	224.463.100	
		7. Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan					
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	64.200.000	
		---					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			---				
					Kecamatan Karangasem	1.404.679.995	
<b>5</b>	<b>5. INFRASTRUKTUR</b>						



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah			
					Sekretariat Daerah	37.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000	
		1. Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 tahun					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase pengelolaan pendidikan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16.990.865.170	
		21. Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Prekuensi penyelenggaraan program pengembangan perumahan			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.974.930	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Frekuensi penyelenggaraan program kawasan permukiman			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.211.209.220	
		22. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik					
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Prekuensi penyelenggaraan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	337.406.900	
		32. Meningkatnya perdagangan dalam negeri.					
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.990.248.700	
		44. Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Karangasem			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.890.900	
		47. Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik, bangunan sungai yang tertata, tersedianya dan terpeliharanya prasarana air baku, tersedianya rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, tersedianya dan terpeliharanya bangunan pengaman pantai			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.818.499.748	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.594.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.352.150.280	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase terlaksananya penataan bangunan gedung di kabupaten Karangasem			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	240.916.100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Terselenggaranya jalan kabupaten berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.196.258.172	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Persentase berkembangnya jasa konstruksi di Kabupaten Karangasem			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.066.800	
		50. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.					
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				Persentase terlaksananya penataan desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.000.000	
		51. Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kinerja lalu Lintas kabupaten/kota			
					Dinas Perhubungan	4.083.251.050	
		61. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	462.833.524	
		---					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				---			
					Kecamatan Karangasem	412.000.000	
<b>6</b>	<b>6. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>						
		13. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Terlaksananya pelayanan penunjang pemerintah daerah				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	447.185.002.892	
			persentase penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				
					Satuan Polisi Pamong Praja	9.272.434.672	
			Persentase program urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.172.522.546	
			Terselenggaranya program urusan pemerintah daerah				
					Dinas Sosial	3.206.540.693	
			Persentase Penyelenggaraan Pelayanan dan Kinerja ASN				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.775.350	
			Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	11.965.100	
			Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	134.741.875	
			Persentase penguatan pelayanan administrasi pemerintah				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Sekretariat Daerah	31.939.020.224		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				persentase penguatan regulasi dan pemerintah umum				
					Sekretariat Daerah	1.192.902.326		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase penguatan pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah				
					Sekretariat Daerah	684.372.300		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota				
					Sekretariat DPRD	38.516.514.092		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase terpenuhinya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	16.583.619.046		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.264.102.900		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	526.508.250		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Prosentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah				
					Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.908.981.995		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkualitas				
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	634.426.700		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat	6.581.353.607	
				Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			
					Kecamatan Abang	56.764.250	
				Presentase terpenuhinya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupate/kota			
					Kecamatan Kubu	2.355.911.970	
				Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			
					Kecamatan Bebandem	134.691.680	
				Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkotaan			
					Kecamatan Selat	3.496.750	
				Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			
					Kecamatan Rendang	3.532.798.812	
				Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Kecamatan Manggis	2.604.512.086	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu			
					Kecamatan Abang	109.400.000	
				Prosentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang tepat waktu			
					Kecamatan Kubu	59.004.000	
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tepat waktu			
					Kecamatan Bebandem	43.000.000	
					Kecamatan Selat	64.400.450	
				Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik			
					Kecamatan Sidemen	20.000.150	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.735.600	
		14. Meningkatnya disiplin PNS					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan			
					Inspektorat	278.057.600	
		15. Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS					
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Prosentase terselenggaranya program kepegawaian daerah			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	779.983.800	
		16. Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.482.589.148	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	203.768.470.832	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	209.700.225	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Pencapaian target penerimaan pajak daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.963.299.100	
		17. Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sangsi					
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Prosentase Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
					Inspektorat	356.630.000	
		1. Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 tahun					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase pengelolaan pendidikan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	101.395.050	
		29.Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan					
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase Terpenuhinya Komunikasi, informasi dan Media Massa			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	90.275.250	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase terpenuhinya layanan informasi Publik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	47.225.300	
		50. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.					
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				Persentase terlaksananya penataan desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	48.600.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
				Persentase terwujudnya kerjasama desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	16.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			
					Kecamatan Abang	69.200.000	
				Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana			
					Kecamatan Kubu	57.000.000	
				Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			
					Kecamatan Selat	38.565.775	
				Presentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan			
					Kecamatan Rendang	20.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali			
					Kecamatan Abang	7.500.000	
				Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			
					Kecamatan Kubu	5.000.000	
				Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali			
					Kecamatan Selat	9.996.600	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi keuangannya			
					Kecamatan Abang	25.400.000	
				Pesentase penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan			
					Kecamatan Bebandem	10.000.000	
				Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangannya			
					Kecamatan Selat	14.962.650	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembinaan dan pengaswasan pemerintahan desa			
					Kecamatan Sidemen	10.000.100	
		58. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Jumlah kelembagaan masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM dan masyarakat yang mendapat bantuan sosial			
					Dinas Sosial	53.616.900	
		61. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan					
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	650.498.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase terselenggaranya informasi administrasi kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	139.630.500	
		68. Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.					
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67.000.475	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000	
		69. Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Terwujudnya program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Satuan Polisi Pamong Praja	461.697.600	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	372.070.350	
		7. Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan					



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	157.800.000		
		---						
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				---				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	170.699.375		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	30.000.000		
					Sekretariat Daerah	1.439.562.945		
					Kecamatan Karangasem	216.129.200		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				---				
					Kecamatan Karangasem	50.200.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				---				
					Kecamatan Karangasem	1.773.812.400		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				---				
					Kecamatan Karangasem	162.835.700		

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>534.892.046.212</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.00</b>	<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>534.892.046.212</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.00</b>	<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>534.892.046.212</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>447.185.002.892</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>644.712.500</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	405.220.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.330.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.955.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.965.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	47.762.500	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.480.000	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>442.202.019.950</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	441.864.534.950	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	337.485.000	
<b>1.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>47.260.000</b>	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.260.000	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>175.912.500</b>	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.912.500	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.135.067.550</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.236.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.964.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.923.828.950	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.038.600	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>423.830.400</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.580.400	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>556.199.992</b>	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.099.992	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.500.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.600.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>87.666.844.820</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>55.997.097.645</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	447.132.500	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.087.301.170	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	335.019.830	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.619.322.100	
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	4.248.714.120	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.995.400	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	89.800.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.124.817.225	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	34.995.300	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.000.000.000	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>24.949.113.225</b>	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	688.351.500	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	427.592.500	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	524.072.200	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	215.301.000	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	326.529.875	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	220.185.500	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.999.725	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	87.097.250	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.758.493.925	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	66.399.750	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.625.090.000	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>4.642.325.200</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	26.400.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	237.517.750	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	371.658.250	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	57.887.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.281.800	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	4.993.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	664.318.700	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	560.068.700	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.619.200.000	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>2.078.308.750</b>	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1.891.585.200	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	84.123.150	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	102.600.400	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>40.198.500</b>	
<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>40.198.500</b>	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	40.198.500	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>323.660.023.454</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>323.660.023.454</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>171.103.495.586</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>52.959.804.236</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>221.121.000</b>	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.400.200	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.771.650	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.801.450	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.119.350	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.028.350	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>50.868.337.136</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.773.533.236	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	94.803.900	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>436.177.100</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.902.800	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.749.200	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.325.100	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.200.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>828.500.000</b>	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.400.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	731.100.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>605.669.000</b>	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.421.400	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.500.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.747.600	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>117.618.388.450</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.676.464.851</b>	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	5.493.858.350	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	239.195.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.089.100.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.822.111.501	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1	2	4	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	32.200.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>107.437.223.599</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	234.100.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	768.862.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	185.565.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	279.120.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	47.020.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	95.790.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.090.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.310.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.430.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	410.035.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	413.393.774	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.000.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	5.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.525.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.615.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.423.211.226	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	34.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	162.410.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.466.152.499	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	98.512.280.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	13.450.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	35.324.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	606.005.100	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	505.220.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	74.315.000	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>484.700.000</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	484.700.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	20.000.000	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>120.700.000</b>	
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.100.000</b>	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.100.000	
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>69.600.000</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.600.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>189.403.000</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>5.000.000</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5.000.000	
<b>1.02.04.2.02</b>	<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	<b>7.000.000</b>	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	7.000.000	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman</b>	<b>5.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	<b>Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5.000.000	
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>172.403.000</b>	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	169.403.000	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	3.000.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>215.199.900</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>215.199.900</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	215.199.900	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>106.663.087.484</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>99.592.401.484</b>	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.592.401.484</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.592.401.484	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>70.000.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	70.000.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>7.070.686.000</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.070.686.000</b>	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.920.701.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	149.985.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Karangasem I</b>	<b>4.281.403.180</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>4.281.403.180</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.281.403.180</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.281.403.180	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Karangasem II</b>	<b>3.593.203.400</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.593.203.400</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.593.203.400</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.593.203.400	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Manggis I</b>	<b>2.458.946.650</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.458.946.650</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.458.946.650</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.458.946.650	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Manggis II</b>	<b>1.281.902.320</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.281.902.320</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.281.902.320</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.281.902.320	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Abang I</b>	<b>3.319.576.200</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.319.576.200</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.319.576.200</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.319.576.200	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Abang II</b>	<b>3.192.575.900</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.192.575.900</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.192.575.900</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.192.575.900	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Kubu I</b>	<b>4.035.806.572</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>4.035.806.572</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.035.806.572</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.035.806.572	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Kubu II</b>	<b>3.343.118.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.343.118.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.343.118.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.343.118.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0010</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Rendang</b>	<b>3.502.352.600</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.502.352.600</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.502.352.600</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.502.352.600	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0011</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Sidemen</b>	<b>3.369.426.180</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.369.426.180</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.369.426.180</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.369.426.180	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0012</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Selat</b>	<b>5.079.252.557</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>5.079.252.557</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.079.252.557</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.079.252.557	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0013</b>	<b>UPTD Kesehatan/Puskesmas Bebandem</b>	<b>3.200.029.800</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.200.029.800</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.200.029.800</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.200.029.800	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0014</b>	<b>UPTD Laboratorium Kesehatan</b>	<b>3.491.633.650</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.491.633.650</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.491.633.650</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.491.633.650	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0015</b>	<b>UPTD Kesehatan RS Pratama</b>	<b>1.744.213.375</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.744.213.375</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.744.213.375</b>	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.744.213.375	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>83.831.789.292</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>83.831.789.292</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>83.831.789.292</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.819.413.292</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.689.463</b>	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.398.200	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.386.600	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.316.600	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.236.600	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.351.463	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.419.450.844</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.419.450.844	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>246.804.800</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.403.200	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.421.900	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.825	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.979.875	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>111.138.705</b>	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	46.941.026	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.197.679	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>260.854.870</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.777.970	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.996.900	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>757.474.610</b>	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.475.410	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.300.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.699.200	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>14.818.499.748</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.930.444.598</b>	
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	318.486.198	
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3.079.500	
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	152.929.400	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	857.463.000	
1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	254.049.800	
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	344.436.700	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.888.055.150</b>	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.532.612.650	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.355.442.500	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>31.594.000</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31.594.000</b>	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	31.594.000	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>3.352.150.280</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.352.150.280</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3.119.204.800	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	232.945.480	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>240.916.100</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>240.916.100</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	24.187.400	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	216.728.700	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>52.196.258.172</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>52.196.258.172</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	105.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	742.563.150	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	4.262.120.450	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	30.033.778.100	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.537.804.900	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.874.108.172	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	5.716.839.400	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	28.939.000	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>136.066.800</b>	
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>39.931.300</b>	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	39.931.300	
<b>1.03.11.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.638.300</b>	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	11.008.400	
1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	6.629.900	
<b>1.03.11.2.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>31.094.000</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	15.290.400	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	15.803.600	
<b>1.03.11.2.04</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>47.403.200</b>	
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	15.575.500	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	31.827.700	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>236.890.900</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>23.135.750</b>	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	23.135.750	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.714.400</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	28.572.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	32.142.400	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>153.040.750</b>	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	26.802.200	
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	17.164.700	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	109.073.850	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>13.245.695.860</b>	
<b>1.04.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>13.245.695.860</b>	
<b>1.04.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>13.245.695.860</b>	
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.315.704.810</b>	
<b>1.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.219.500</b>	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.884.025	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.884.025	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.871.650	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.871.650	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.708.150	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.695.776.860</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.630.977.185	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.799.675	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>228.239.425</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.106.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.629.500	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.914.050	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.389.875	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159.969.000</b>	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.770.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.999.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000	
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>222.500.025</b>	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.900.025	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.600.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>197.974.930</b>	
<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>197.974.930</b>	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	197.974.930	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>9.394.609.220</b>	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>183.400.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	101.698.600	
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	81.701.400	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>9.211.209.220</b>	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	9.211.209.220	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>337.406.900</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>337.406.900</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	35.135.050	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	244.923.850	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	57.348.000	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>20.076.546.365</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>12.013.468.879</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>12.013.468.879</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.003.387.054</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.998.975</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.825	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.499.725	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.825	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.825	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.999.775	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.222.934.716</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.186.934.716	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>292.911.606</b>	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.765.000	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.714.800	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.957.500	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.594.175	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.131	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.924.800</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.980.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.944.800	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>377.616.957</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.616.957	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.010.081.825</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.116.882.375</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	676.319.925	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	246.821.700	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.753.150	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	95.987.600	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>893.199.450</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21.135.150	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.499.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	811.564.500	
<b>1.05.0.00.0.00.02.00</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran</b>	<b>3.993.755.015</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.00</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran</b>	<b>3.993.755.015</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.753.393.915</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>130.685.560</b>	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.685.560	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.292.968.148</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.292.968.148	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>132.078.747</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.700	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.589.350	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.207.250	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.456.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.327.447	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.437.100</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.637.100	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>128.224.360</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.024.360	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.200.000	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.240.361.100</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.102.582.450</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.102.582.450	
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>137.778.650</b>	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	137.778.650	
<b>1.05.0.00.0.00.04.00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>4.069.322.471</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.04.00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>4.069.322.471</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.172.522.546</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.702.700</b>	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.702.700	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.624.208.942</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.624.208.942	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95.232.475</b>	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.014.300	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.218.400	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.999.775	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>274.259.800</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.998.700	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.261.100	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>121.118.629</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.118.779	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.999.850	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.896.799.925</b>	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>474.342.425</b>	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	361.199.925	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	113.142.500	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>1.422.457.500</b>	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.422.457.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>5.968.797.233</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>5.968.797.233</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>5.968.797.233</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.799.771.233</b>	
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.600.000</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.800.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.800.000	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.127.966.213</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.566.213	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	74.400.000	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>139.531.380</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.616.900	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.240.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.674.480	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.073.640</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.500.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.000.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.573.640	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>331.600.000</b>	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	258.200.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.400.000	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>622.843.650</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>622.843.650</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26.650.600	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.161.750	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	146.643.650	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	291.770.750	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	53.616.900	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.073.056.850</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.073.056.850</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	588.200.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	44.200.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	264.400.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	86.656.850	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	48.000.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	41.600.000	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>238.390.800</b>	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>238.390.800</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.472.850	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	96.917.950	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>111.934.700</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>82.054.200</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	82.054.200	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>29.880.500</b>	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29.880.500	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>122.800.000</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>122.800.000</b>	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122.800.000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>5.975.614.503</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	<b>5.975.614.503</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	<b>5.975.614.503</b>	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.535.635.328</b>	
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.468.425</b>	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.471.575	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.996.850	
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.886.845.333</b>	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.886.845.333	
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>391.789.950</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.323.200	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.286.150	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.955.500	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.303.600	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.921.500	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.500.000</b>	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172.031.620</b>	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.031.620	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>315.000.000</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>250.000.000</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	250.000.000	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>12.725.900</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12.725.900	
<b>2.07.03.2.04</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>26.566.650</b>	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	26.566.650	
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.707.450</b>	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	25.707.450	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>60.007.450</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.025.850</b>	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	3.501.100	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	10.914.750	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	10.610.000	
<b>2.07.04.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.489.100</b>	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	7.489.100	
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>10.006.100</b>	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	10.006.100	
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.994.900</b>	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	9.994.900	
<b>2.07.04.2.05</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.491.500</b>	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.491.500	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>64.971.725</b>	
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.470.350</b>	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	8.334.100	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	8.334.100	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	11.802.150	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>36.501.375</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.916.400	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.165.175	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	5.996.800	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	17.423.000	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>2.638.429.625</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>2.638.429.625</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>2.638.429.625</b>	
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.442.930.425</b>	
<b>2.08.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.421.500</b>	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.421.500	
<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.060.533.725</b>	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.060.533.725	
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>130.831.900</b>	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.542.200	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.308.200	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.641.500	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.500.000	
<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.500.000</b>	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.843.300</b>	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.894.000	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.949.300	
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.800.000</b>	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.180.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.620.000	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>71.599.475</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>41.560.900</b>	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	41.560.900	
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>30.038.575</b>	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.038.575	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>27.539.800</b>	
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.539.800</b>	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.539.800	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>52.499.725</b>	
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>25.069.950</b>	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.069.950	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>27.429.775</b>	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.429.775	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>43.860.200</b>	
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>43.860.200</b>	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.860.200	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>2.835.109.544</b>	
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>2.835.109.544</b>	
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>2.835.109.544</b>	
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.634.749.419</b>	
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.110.900</b>	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	765.400	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	831.900	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	809.400	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	880.200	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.824.000	
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.361.378.444</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.310.978.444	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.400.000	
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98.783.175</b>	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.132.800	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.446.600	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.493.600	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.710.175	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.900.000</b>	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.900.000	
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>124.576.900</b>	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.326.300	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.250.600	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>117.310.325</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>58.136.450</b>	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	58.136.450	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>59.173.875</b>	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	59.173.875	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>42.024.800</b>	
<b>2.09.04.2.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>42.024.800</b>	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	42.024.800	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>41.025.000</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.025.000</b>	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.025.000	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>13.438.178.332</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>13.438.178.332</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>13.438.178.332</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.356.055.723</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>101.040.175</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.124.475	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.915.700	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.776.955.248</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.776.955.248	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>99.298.000</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.003.200	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.545.800	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.549.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>122.593.900</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.996.800	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.397.100	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>256.168.400</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.168.400	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>125.674.900</b>	
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>125.674.900</b>	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.674.900	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>256.088.250</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>250.503.900</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	178.734.850	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	30.697.750	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	41.071.300	
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>5.584.350</b>	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	5.584.350	
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>660.019.250</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>660.019.250</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	660.019.250	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>24.955.800</b>	
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>24.955.800</b>	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24.955.800	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>24.869.400</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.869.400</b>	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.869.400	
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>20.339.000</b>	
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>20.339.000</b>	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.339.000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>7.970.176.009</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>7.887.264.325</b>	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	25.137.875	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.102.126.450	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	760.000.000	
<b>2.11.11.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>82.911.684</b>	
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	82.911.684	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>7.850.528.896</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>7.850.528.896</b>	
<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>7.850.528.896</b>	
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.150.028.646</b>	
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>102.567.950</b>	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.775.350	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.193.550	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.650	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	66.599.500	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.999.900	
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.160.008.908</b>	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.648.308	
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.360.600	
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>187.302.688</b>	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.995.200	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.672.250	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.194.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.441.275	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.999.963	
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>235.397.100</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.200.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.197.100	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>424.752.000</b>	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.200.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.600.000	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.952.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>2.116.494.375</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.156.495.275</b>	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	151.700.350	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	515.996.075	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	488.798.850	
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>959.999.100</b>	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	9.999.100	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	950.000.000	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>1.273.676.000</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>252.200.000</b>	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	212.200.000	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	40.000.000	
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>1.011.476.000</b>	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	169.000.000	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	842.476.000	
<b>2.12.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>10.000.000</b>	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	10.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>310.329.875</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>139.630.500</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	129.630.600	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	9.999.900	
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>170.699.375</b>	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.899.500	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	53.199.875	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	67.600.000	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>4.656.004.315</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	<b>4.656.004.315</b>	
<b>2.13.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	<b>4.656.004.315</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.291.404.315</b>	
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.264.400</b>	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	753.550	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	799.550	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	711.300	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.818.752.278</b>	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.207.078	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.058.000	
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.243.200	
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.244.000	
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.100.100</b>	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.558.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.160.000	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.382.100	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	



### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>39.257.137</b>	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.257.137	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>129.830.400</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.150.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.350.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.330.400	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170.200.000</b>	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.200.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>59.600.000</b>	
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>59.600.000</b>	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	3.000.000	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	41.600.000	
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	4.000.000	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	11.000.000	
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>16.000.000</b>	
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>16.000.000</b>	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8.000.000	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8.000.000	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>172.800.000</b>	
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>172.800.000</b>	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	12.846.650	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	57.100.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	3.000.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	15.000.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	15.285.400	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	6.991.200	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.737.800	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	6.415.550	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	7.214.600	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24.208.800	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>116.200.000</b>	
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>116.200.000</b>	
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10.000.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.000.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	32.200.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	7.000.000	
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	7.000.000	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>6.685.520.282</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.14.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga</b>	<b>6.685.520.282</b>	
<b>2.14.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga</b>	<b>6.685.520.282</b>	
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.229.606.282</b>	
<b>2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.000.000</b>	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.409.046.282</b>	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.409.046.282	
<b>2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>675.706.025</b>	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.009.600	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.166.700	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	622.325.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.725	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.045.000	
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.500.000</b>	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	
<b>2.14.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.353.975</b>	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.484.775	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.869.200	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>32.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.500.000</b>	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	32.500.000	
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>2.286.842.000</b>	
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.251.198.400</b>	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	32.500.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	591.606.400	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	523.172.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	103.920.000	
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>38.265.600</b>	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	38.265.600	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>997.378.000</b>	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.028.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	908.850.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.907.000	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20.593.000	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.136.572.000</b>	
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1.136.572.000</b>	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	468.000.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	270.336.000	
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	368.236.000	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>17.288.559.001</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>17.288.559.001</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>17.288.559.001</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.589.981.351</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.663.100</b>	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.663.100	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.985.447.171</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.904.834.421	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.053.700	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75.559.050	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>314.027.200</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.705.500	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.403.200	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.958.500	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.960.000	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.328.100</b>	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.328.100	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.950.942.880</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.400.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.843.244.680	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.298.200	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>315.572.900</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.572.900	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.000.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>7.698.577.650</b>	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>4.080.165.200</b>	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.138.324.600	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	941.840.600	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>296.000.000</b>	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	296.000.000	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.330.243.150</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.965.847.850	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	318.482.100	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.913.200	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>75.250.175</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	51.211.100	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	24.039.075	
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>107.308.800</b>	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	107.308.800	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>809.610.325</b>	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	809.610.325	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>6.230.698.980</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.230.698.980</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.230.698.980</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.730.618.880</b>	
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.700.500</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.675.500	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.025.000	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.414.867.880</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.414.867.880	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>84.482.000</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.289.600	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.032.900	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.593.500	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.646.000	
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.949.530.100</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.943.159.600	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.170.500	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>240.038.400</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.722.400	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.496.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.820.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>160.228.550</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>160.228.550</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	33.976.700	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	56.298.550	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	37.474.500	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	32.478.800	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>339.851.550</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.225.300</b>	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.225.300	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>292.626.250</b>	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	38.970.950	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	159.274.150	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	19.729.900	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	39.652.350	
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	34.998.900	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>5.238.896.813</b>	
<b>2.17.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>5.238.896.813</b>	
<b>2.17.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>5.238.896.813</b>	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.202.034.813</b>	
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.625.900</b>	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.852.900	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.217.250	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.679.600	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.897.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.979.150	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.632.378.983</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.527.978.983	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.400.000	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>182.515.400</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.223.200	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.092.200	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.923.500</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.123.500	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.800.000	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.591.030</b>	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.658.700	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.632.330	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.300.000	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>369.500.000</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>369.500.000</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	120.600.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	248.900.000	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>314.762.000</b>	
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>314.762.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	<b>Kabupaten/Kota</b>		
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	43.800.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	270.962.000	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>352.600.000</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>352.600.000</b>	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	287.314.100	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	31.203.300	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	34.082.600	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>5.306.241.293</b>	
<b>2.18.2.18.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>5.306.241.293</b>	
<b>2.18.2.18.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>5.306.241.293</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.498.241.293</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42.143.900</b>	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.807.450	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.590.700	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.197.450	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.548.300	
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.905.954.487</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.730.087	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.224.400	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>303.143.700</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.700	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.934.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.055.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.158.000	
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>494.224.100</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.850.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.200.000	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.174.100	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>712.775.106</b>	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.484.106	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475.291.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>187.245.350</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>164.543.650</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	70.772.850	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	93.770.800	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>22.701.700</b>	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	22.701.700	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>66.327.900</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>66.327.900</b>	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	66.327.900	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>450.137.750</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>450.137.750</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	198.755.900	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	223.473.300	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	27.908.550	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>60.170.400</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.170.400</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.336.500	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	22.833.900	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>44.118.600</b>	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>44.118.600</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.118.600	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>3.052.191.464</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.00</b>	<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.052.191.464</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.00</b>	<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.052.191.464</b>	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.473.161.389</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.373.161.389</b>	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	133.947.165	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	101.600.400	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	462.833.524	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	674.780.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.19.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>1.579.030.075</b>	
<b>2.19.03.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>621.578.675</b>	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	621.578.675	
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>957.451.400</b>	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	957.451.400	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>45.015.600</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>45.015.600</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>45.015.600</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>45.015.600</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.015.600</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25.019.650	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	19.995.950	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>19.994.400</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>19.994.400</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>19.994.400</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>19.994.400</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.994.400</b>	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.994.400	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>6.029.486.371</b>	
<b>2.22.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Kebudayaan</b>	<b>6.029.486.371</b>	
<b>2.22.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Kebudayaan</b>	<b>6.029.486.371</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.492.086.371</b>	
<b>2.22.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.180.200</b>	
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.180.200	
<b>2.22.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.099.346.971</b>	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.166.371	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.180.600	
<b>2.22.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100.002.400</b>	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	985.300	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.576.800	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.979.500	
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.960.800	
<b>2.22.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>169.170.350</b>	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.666.100	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.100	
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.859.950	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.644.200	
<b>2.22.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>121.386.450</b>	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.886.450	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.296.800.000</b>	
<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>66.800.000</b>	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	66.800.000	
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>840.600.000</b>	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	775.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	65.600.000	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.389.400.000</b>	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	45.000.000	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.344.400.000	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>94.400.000</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>94.400.000</b>	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	94.400.000	
<b>2.22.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>79.400.000</b>	
<b>2.22.04.2.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.400.000</b>	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	79.400.000	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>66.800.000</b>	
<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>66.800.000</b>	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	66.800.000	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>3.819.840.696</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>3.819.840.696</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>3.819.840.696</b>	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.196.032.696</b>	
<b>2.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>49.723.600</b>	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.723.600	
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.738.305.312</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.305.312	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>118.438.784</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.332.200	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.071.400	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.998.050	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.037.134	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.023.400</b>	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.594.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.629.400	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>158.541.600</b>	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.241.600	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.300.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>549.891.675</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>512.591.850</b>	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	463.866.850	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	48.725.000	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.299.825</b>	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	37.299.825	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>73.916.325</b>	
<b>2.23.03.2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>63.452.925</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	63.452.925	
<b>2.23.03.2.02</b>	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.463.400</b>	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	10.463.400	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>112.774.000</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>112.774.000</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>112.774.000</b>	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>84.399.550</b>	
<b>2.24.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>84.399.550</b>	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	35.050.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	49.349.550	
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>28.374.450</b>	
<b>2.24.03.2.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	<b>28.374.450</b>	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	28.374.450	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>5.336.514.243</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>5.336.514.243</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perikanan</b>	<b>5.336.514.243</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.732.182.390</b>	
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>51.377.100</b>	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	941.100	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	977.600	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.998.200	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.999.200	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.461.000	
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.233.708.508</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.194.108.508	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.600.000	
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>179.642.106</b>	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.034.400	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.694.600	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.735.400	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.012.700	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.165.006	
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.867.500</b>	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.251.500	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.416.000	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000	
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>185.587.176</b>	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.440.806	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.646.370	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>112.794.403</b>	
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>66.399.953</b>	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	66.399.953	
<b>3.25.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>46.394.450</b>	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	46.394.450	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.491.537.450</b>	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>102.799.650</b>	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	51.399.675	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	51.399.975	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.388.737.800</b>	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.282.738.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	105.999.800	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>10.633.388.600</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>10.633.388.600</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>10.633.388.600</b>	
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.209.765.800</b>	
<b>3.26.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.754.100</b>	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.599.000	
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.105.800	
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.655.000	
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.681.800	
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	712.500	
<b>3.26.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.631.448.150</b>	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.532.133.750	
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.400.000	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.914.400	
<b>3.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>228.252.650</b>	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.532.300	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.195.700	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.845.500	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.953.950	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.225.200	
<b>3.26.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.200.000</b>	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.800.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.400.000	
<b>3.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>190.110.900</b>	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.110.900	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>6.467.811.850</b>	
<b>3.26.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>300.358.500</b>	
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	32.098.650	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	268.259.850	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>5.808.255.550</b>	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.746.943.325	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	29.134.800	
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	32.177.425	
<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>359.197.800</b>	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	359.197.800	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>320.802.525</b>	
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>320.802.525</b>	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	38.863.900	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	65.555.725	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	29.675.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	186.707.100	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>635.008.425</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>635.008.425</b>	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	562.916.775	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	27.086.475	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	45.005.175	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>18.067.825.294</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>18.067.825.294</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>18.067.825.294</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.577.726.019</b>	
<b>3.27.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74.819.840</b>	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.085.790	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	736.900	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	736.900	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.249.700	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.437.200	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.573.350	
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.502.809.354</b>	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.392.310.454	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	110.498.900	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>453.538.525</b>	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.679.600	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.635.700	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.862.250	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.140.975	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.797.300</b>	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.300.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.497.300	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>398.761.000</b>	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.761.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>378.095.700</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>101.167.700</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	56.792.500	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	44.375.200	
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>276.928.000</b>	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	44.200.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	175.929.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	56.799.000	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>181.493.825</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>113.594.000</b>	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	44.194.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	69.400.000	
<b>3.27.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>67.899.825</b>	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	67.899.825	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>626.941.650</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>533.842.000</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	533.842.000	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>93.099.650</b>	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	93.099.650	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>183.000.550</b>	
<b>3.27.05.2.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>183.000.550</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.801.300	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	69.400.000	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.799.250	
<b>3.27.06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>88.374.850</b>	
<b>3.27.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>88.374.850</b>	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	44.198.900	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	44.175.950	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.032.192.700</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1.032.192.700</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	905.992.700	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	56.800.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	69.400.000	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>4.511.333.700</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>4.511.333.700</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>4.511.333.700</b>	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>18.798.875</b>	
<b>3.30.02.2.06</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di</b>	<b>18.798.875</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	18.798.875	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>4.315.006.300</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>4.155.048.700</b>	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.990.248.700	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.164.800.000	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>159.957.600</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9.957.600	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>91.223.500</b>	
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>35.622.475</b>	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.622.475	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>44.399.450</b>	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	36.399.675	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	7.999.775	
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.201.575</b>	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	11.201.575	
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>52.199.700</b>	
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52.199.700</b>	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	13.999.850	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	38.199.850	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>14.550.400</b>	
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>14.550.400</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	2.995.700	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.554.700	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>19.554.925</b>	
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>19.554.925</b>	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	19.554.925	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>11.392.099.060</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>11.392.099.060</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>11.392.099.060</b>	
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.244.300.085</b>	
<b>3.31.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>54.972.175</b>	
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.530.300	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.441.875	
<b>3.31.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.274.492.554</b>	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.230.092.554	
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.400.000	
<b>3.31.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>167.411.325</b>	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.500.000	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.721.400	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.129.225	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.739.700	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.321.000	
<b>3.31.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>542.336.511</b>	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96.300.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	419.636.511	
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.400.000	
<b>3.31.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>205.087.520</b>	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.887.520	
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.200.000	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>6.088.114.825</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>6.088.114.825</b>	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11.715.375	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6.038.199.450	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	38.200.000	
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>18.284.225</b>	
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>18.284.225</b>	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	18.284.225	
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>41.399.925</b>	
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>41.399.925</b>	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	41.399.925	
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>9.992.550</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	<b>9.992.550</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	<b>9.992.550</b>	
<b>3.32.03</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>9.992.550</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.32.03.2.01</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.992.550</b>	
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	9.992.550	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>38.527.589.359</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>38.527.589.359</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>661.639.176</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>193.381.700</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74.151.800</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.538.800	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.613.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>58.029.900</b>	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.029.900	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.500.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.700.000</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.200.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>468.257.476</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>343.788.300</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	86.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	85.988.500	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	171.799.800	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>124.469.176</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	124.469.176	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>868.856.560</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>144.211.710</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.915.000</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.413.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.502.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.215.900</b>	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.215.900	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92.080.810</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.080.810	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>724.644.850</b>	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>724.644.850</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	210.237.450	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	398.692.200	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	115.715.200	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>468.826.180</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>468.826.180</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70.456.400</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.165.200	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.291.200	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.000.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>27.000.000</b>	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>600.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.000.000</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>325.769.780</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	115.081.500	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.110.080	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	49.600.350	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	42.321.800	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	59.656.050	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>436.225.360</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>150.459.360</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>44.271.750</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.272.400	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.999.350	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.687.400</b>	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.687.400	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>520.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>86.980.210</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.980.210	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>285.766.000</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>208.766.000</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	88.400.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	71.581.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	48.785.000	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>77.000.000</b>	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	40.000.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	37.000.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	<b>485.933.975</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>112.659.900</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>10.775.100</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.489.050	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.286.050	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.000.000</b>	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>600.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.284.800</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.784.800	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>373.274.075</b>	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>373.274.075</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	77.805.025	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	153.927.850	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	141.541.200	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>2.361.100.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>145.668.500</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>23.268.500</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.745.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.523.500	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>122.400.000</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.400.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>2.215.431.500</b>	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>2.215.431.500</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.015.431.500	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.036.763.120</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.036.763.120</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>52.476.100</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.476.100	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>171.400.000</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.400.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.812.887.020</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	487.316.200	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	944.952.620	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	380.618.200	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>	<b>15.644.372.312</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.644.372.312</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.332.800</b>	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.993.625	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.339.175	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.345.047.562</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.208.510.812	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.536.750	
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.449.250</b>	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.255.000	
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.194.250	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>69.142.700</b>	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.323.700	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.819.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.900.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.500.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>15.155.067.876</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.155.067.876</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>7.218.103.624</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.256.600	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.340.406.400	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.174.800.360	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.185.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.362.425.689	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.116.029.575	
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>198.050.000</b>	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7.750.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.300.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.159.715.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.450.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.000.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.265.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.033.374.188</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.020.800.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.036.960.998	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.353.190	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.500.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.852.760.000	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.181.784.064</b>	



### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	770.534.064	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	311.250.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.364.041.000</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	648.925.500	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	648.925.500	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	66.190.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0010</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>408.804.800</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>97.706.575</b>	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>25.392.875</b>	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.678.400	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.320.100	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.394.375	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>28.863.700</b>	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	28.863.700	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>450.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.000.000</b>	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>311.098.225</b>	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>311.098.225</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	241.629.425	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	28.653.950	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40.814.850	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>56.747.954.695</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>56.747.954.695</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.02.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>56.747.954.695</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>39.676.486.092</b>	
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91.710.400</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.704.400	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.389.600	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.616.400	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.239.994.478</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.131.398.028	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.375.250	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	92.221.200	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.346.199.300</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.634.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.666.300	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	605.916.400	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.297.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	234.960.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.730.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.040.000	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	217.955.600	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.213.906.500</b>	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.638.500.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	68.006.500	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	345.800.000	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.600.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>821.707.300</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.600.000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	441.307.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.710.712.410</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	698.410.610	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.909.800	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	715.392.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>28.559.852.604</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.809.720.304	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	696.662.200	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	53.470.100	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>692.403.100</b>	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	692.403.100	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>17.071.468.603</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.392.119.511</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	876.841.680	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.515.277.831	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>743.726.990</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	158.070.400	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	119.463.800	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	140.061.300	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	140.061.300	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	186.070.190	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>493.295.900</b>	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	99.211.650	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	99.448.100	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	96.806.150	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	98.918.600	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	98.911.400	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>4.330.522.702</b>	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	3.096.851.395	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	416.507.557	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	817.163.750	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.768.950.700</b>	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	71.342.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.697.608.700	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>5.342.852.800</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.342.852.800	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>6.934.772.380</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>6.934.772.380</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>6.934.772.380</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.144.161.230</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.478.550</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.267.250	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	834.350	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	834.350	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.476.350	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.476.350	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.589.900	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.045.793.853</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.920.465.953	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.315.000	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.012.900	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>284.125.850</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.995.500	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.845.550	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.284.800	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>199.290.450</b>	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.180.000	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.110.450	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>161.100.100</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.600.100	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>444.372.427</b>	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.748.600	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.177.457	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.446.370	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.264.102.900</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>971.656.000</b>	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	132.753.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	838.903.000	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>155.791.800</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	92.891.800	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	62.900.000	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>136.655.100</b>	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	136.655.100	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>526.508.250</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>182.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.000.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.000.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.000.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	37.000.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.000.000	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>184.810.750</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.120.400	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.476.850	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.033.800	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	70.615.700	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.885.200	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.304.200	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.567.700	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7.806.900	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>159.697.500</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.235.550	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.048.450	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.268.600	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	44.797.900	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29.918.200	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	10.255.300	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	34.285.900	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	5.887.600	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>223.424.059.305</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.04.00</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>223.424.059.305</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.04.00</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>223.424.059.305</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.482.589.148</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57.654.150</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.954.400	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.699.750	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.138.805.803</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.064.667.903	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.300.000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.837.900	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>485.745.930</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.493.900	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.155.500	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.750.280	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.846.250	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.300.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.200.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>244.029.900</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.989.900	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.940.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.100.000	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>551.353.365</b>	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.016.600	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.600.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.736.765	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>203.768.470.832</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>439.001.535</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	39.203.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	39.203.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.960.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	9.960.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	27.061.900	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	17.236.100	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	144.447.735	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	109.212.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	42.717.800	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>322.902.200</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	30.145.400	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	58.777.600	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	130.952.700	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.026.500	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>254.403.075</b>	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	61.994.100	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	10.757.700	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	40.314.700	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24.788.150	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.743.125	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.412.700	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7.366.800	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	3.025.800	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>202.604.386.922</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	179.757.282.900	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.600.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.247.104.022	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>147.777.100</b>	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	147.777.100	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>209.700.225</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>209.700.225</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	35.517.325	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.196.800	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	29.642.700	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	21.918.400	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	36.219.700	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	27.045.600	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	9.541.600	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	13.918.300	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.699.800	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.963.299.100</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>2.963.299.100</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	116.765.850	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	88.373.650	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	114.769.600	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	42.662.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62.163.800	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	183.533.450	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	41.352.900	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	11.598.100	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	76.375.700	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	16.871.350	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.208.832.700	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>6.570.776.831</b>	
<b>5.03.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>6.570.776.831</b>	
<b>5.03.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>6.570.776.831</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.790.793.031</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.125.000</b>	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.125.000	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.915.481.995</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.981.995	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>254.743.000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.456.200	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.647.200	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.956.400	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.183.200	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>75.227.500</b>	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	20.994.200	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.233.300	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>146.418.000</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.218.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.400.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.800.000	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>377.797.536</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.682.536	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.115.000	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>779.983.800</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>315.209.050</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	66.896.100	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	77.929.850	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	56.323.750	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	83.468.400	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	30.590.950	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>183.401.400</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	90.000.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	93.401.400	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>178.379.800</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	99.390.500	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	78.989.300	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>102.993.550</b>	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.000.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	23.985.350	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14.697.200	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	14.311.000	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>634.426.700</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>634.426.700</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>634.426.700</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>634.426.700</b>	
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>150.939.900</b>	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.939.900	
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>207.939.900</b>	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	207.939.900	
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>207.939.900</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	207.939.900	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>67.607.000</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	67.607.000	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>7.216.041.207</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>7.216.041.207</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>7.216.041.207</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.581.353.607</b>	
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.200.000</b>	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.200.000	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.646.425.904</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.646.425.904	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>242.968.900</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.531.000	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.786.800	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.444.300	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.006.800	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.000.000	
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>264.542.500</b>	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.542.500	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>143.467.500</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.407.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.660.000	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.200.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170.748.803</b>	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.451.400	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.297.403	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>278.057.600</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>253.057.600</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	38.997.800	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	80.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	20.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	84.059.800	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>25.000.000</b>	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25.000.000	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>356.630.000</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>128.630.000</b>	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	128.630.000	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>228.000.000</b>	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	89.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	139.000.000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>35.050.458.317</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Kecamatan Karangasem</b>	<b>11.313.170.821</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Kecamatan Karangasem</b>	<b>5.835.684.651</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.740.484.651</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26.964.350</b>	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.964.350	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.292.826.211</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.185.426.211	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.400.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>148.483.700</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.971.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.841.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.470.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>13.000.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.210.390</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.450.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.802.690	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.957.700	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175.000.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.600.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.800.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.600.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>50.200.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>30.200.000</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30.200.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>22.500.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>22.500.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.500.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7.500.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>7.500.000</b>	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>15.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>Kelurahan Subagan</b>	<b>1.663.597.100</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>364.097.000</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>62.400.000</b>	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.400.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>81.401.700</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.496.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.623.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.996.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.285.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>62.000.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.798.200</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.198.200	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.497.100</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.697.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.800.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.141.664.400</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.141.664.400</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.582.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	574.855.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	528.996.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	28.230.800	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>157.835.700</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>157.835.700</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	157.835.700	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>Kelurahan Karangasem</b>	<b>2.130.278.720</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>281.598.725</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>84.000.000</b>	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>66.020.220</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.493.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.322.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.204.320	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.200.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.200.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.527.200</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.432.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.595.200	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.851.305</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.851.305	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.848.679.995</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.848.679.995</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.461.875	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	412.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.379.218.120	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	32.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>Kelurahan Padangkerta</b>	<b>1.683.610.350</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>395.450.200</b>	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>66.000.000</b>	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>109.143.100</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.814.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.275.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.054.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>58.533.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.508.100	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.024.900	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.748.900</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.248.900	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.025.200</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.729.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.296.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.288.160.150</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.288.160.150</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.245.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	598.645.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	643.133.700	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	29.135.850	
<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>Kecamatan Abang</b>	<b>3.763.751.946</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>Kecamatan Abang</b>	<b>3.763.751.946</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.533.351.946</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.300.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.081.750	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	492.050	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	691.925	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	567.050	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	567.225	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.900.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.095.795.146</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.002.595.146	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.800.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.400.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>151.516.500</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.496.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.520.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.499.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.500.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>97.140.300</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.750.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.707.800	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.682.500	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.100.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.300.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>109.400.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>48.800.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48.800.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>60.600.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	30.800.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	29.800.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>69.200.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>69.200.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.400.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.800.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7.500.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>7.500.000</b>	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>44.300.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>44.300.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.400.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18.900.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.00</b>	<b>Kecamatan Kubu</b>	<b>2.827.381.882</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.00</b>	<b>Kecamatan Kubu</b>	<b>2.827.381.882</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.659.381.882</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.548.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	750.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.548.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.244.758.003</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.264.603	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.493.400	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>160.843.967</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.694.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.438.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.263.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.008.967	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.408.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.208.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>152.823.912</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.823.912	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>79.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>57.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>22.000.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	19.996.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.004.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>57.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>57.000.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>27.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.00</b>	<b>Kecamatan Bebandem</b>	<b>3.064.471.196</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.04.00</b>	<b>Kecamatan Bebandem</b>	<b>3.064.471.196</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.952.471.196</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.000.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.575.297.416</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.415.497.416	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.800.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>143.688.400</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.316.150	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.372.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.793.700</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.500.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.303.700	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>141.691.680</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.691.680	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>48.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>38.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>35.000.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.000.000	



### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>19.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>19.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.00</b>	<b>Kecamatan Selat</b>	<b>3.523.070.242</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.00</b>	<b>Kecamatan Selat</b>	<b>3.523.070.242</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.395.144.767</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.996.425</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	499.725	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.975	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.850	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499.975	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	499.725	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.497.175	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.862.178.282</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.799.678.382	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.900	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>250.090.260</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.856.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.443.960	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.789.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.913.400</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.913.400	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>195.966.400</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.966.400	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>64.400.450</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>54.415.650</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.415.650	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>9.984.800</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.995.100	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.989.700	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.565.775</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.565.775</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.569.500	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.999.675	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.996.600	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9.996.600</b>	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>9.996.600</b>	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.996.600	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.962.650</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>14.962.650</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.987.550	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.987.550	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.987.550	
<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>Kecamatan Rendang</b>	<b>4.236.361.052</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>Kecamatan Rendang</b>	<b>4.236.361.052</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.088.361.052</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.500.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.250.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.589.048.812</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.527.548.812	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>187.971.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.465.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.006.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.200.000</b>	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.200.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.780.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.780.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.861.240</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.861.240	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>88.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>58.000.000</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	32.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	26.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>Kecamatan Sidemen</b>	<b>3.138.979.842</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>Kecamatan Sidemen</b>	<b>3.138.979.842</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.038.995.117</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.999.400</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.975	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.499.750	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.499.875	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.539.773.807</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.485.073.832	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.200.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.975	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>167.423.610</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.493.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.859.350	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.471.360	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>168.098.300</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.800.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.300.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.998.300	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>156.700.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.700.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>39.985.175</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>20.000.150</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.150	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>19.985.025</b>	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.999.950	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.985.075	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>29.999.650</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>29.999.650</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.999.650	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9.999.800</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>9.999.800</b>	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.999.800	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>20.000.100</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>20.000.100</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.100	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Manggis	3.183.271.336	
7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Manggis	3.183.271.336	
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.002.671.411</b>	
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.499.800</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.750	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.050	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.825	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	999.775	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.580.311.336</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.564.011.336	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.800.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>186.870.275</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.994.275	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.376.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.830.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.500.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.830.000	
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>163.160.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.660.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	

### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>71.900.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>44.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.000.000	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>27.900.000</b>	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.900.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>39.999.925</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>39.999.925</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.999.925	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>16.900.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>16.900.000</b>	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.900.000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>51.800.000</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>51.800.000</b>	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29.800.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.000.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>6.551.152.719</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>6.551.152.719</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>6.551.152.719</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.070.935.596</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.013.900</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.735.600	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.421.600	



### Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.741.600	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.943.800	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.976.400	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.730.500	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.464.400	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.176.266.196</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.176.266.196	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>234.769.900</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.047.500	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.322.900	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.856.800	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.542.700	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>109.485.600</b>	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.680.000	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.220.000	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.585.600	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>282.400.000</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.400.000	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>232.000.000</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.000.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>435.687.050</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>435.687.050</b>	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	66.896.250	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	337.521.050	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31.269.750	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>958.000.523</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>958.000.523</b>	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	67.000.475	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.999.700	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	856.000.348	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>94.999.950</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>94.999.950</b>	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	64.999.950	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>344.152.300</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>344.152.300</b>	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	224.463.100	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	119.689.200	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>647.377.300</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>647.377.300</b>	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	372.070.350	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.406.950	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	219.900.000	